

ANALISIS INDIKATOR DAN STANDAR PENETAPAN KELUARGA MISKIN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TENGGARA

Roezaini Soefi

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunung Leuser Aceh

Email: soefiroezaini@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the fact that the concept of poverty in Indonesia has developed over time. Likewise, the existence of a distinction or difference in principle between the government and sharia regarding the nomenclature of the poor and needy requires all parties to reformulate the concept of poverty. The method used in this study is a descriptive qualitative method. While this type of research is a type of library research. This research was conducted by collecting library data without being followed by empirical testing. While the approach to this research uses a normative socio-economic approach, where this paper seeks the essence of each value of Islamic teachings to then be transformed into forms of socio-economic activities. The results of this study are that the clear distinction between the government and Islam can be mediated by the role of 'urf and 'adah to then find a clear synchronization point regarding poverty in Indonesia according to the Islamic perspective. The goal, first, is that these findings can be projected as a basis for formulating standardization of mustahiq zakat, especially the poor in Indonesia. Second, the terminology of the poor and needy who are included in the asnaf ats-tsamaniyah group of zakat recipients can be translated and interpreted contextually according to the economic situation and conditions in Indonesia based on real data on poverty conditions in Indonesia. Third, the large potential of zakat in Indonesia can be utilized by the government as an economic empowerment program based on zakat and based on the welfare of the community for the poor and needy in Indonesia.

Keywords: Indicator Analysis, Family Determination Standards, BPS

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa konsep tentang kemiskinan di Indonesia mengalami perkembangan dan masa ke masa. Begitupun juga adanya distingsi atau perbedaan yang prinsip antara pemerintah dengan syari'ah mengenai nomenklatur fakir dan miskin menuntut semua pihak untuk mereformulasikan kembali tentang konsep kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kepustakaan tanpa diikuti dengan uji empirik. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan social economic normatif, dimana tulisan ini mencari hakekat dari setiap nilai dari ajaran Islam untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk aktifitas sosial ekonomi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa distingsi yang gamblang antara pemerintah dan Islam dapat dimediasi dengan peran 'urf dan 'adah untuk kemudian dapat ditemukan suatu titik sinkronisasi yang jelas mengenai kemiskinan di Indonesia sesuai perspektif Islam. Tujuannya, pertama, temuan tersebut dapat diproyeksikan menjadi landasan terhadap perumusan standardisasi mustahiq zakat khususnya fakir miskin di Indonesia. Kedua, terminologi mengenai fakir dan miskin yang termasuk golongan asnaf ats-tsamaniyah penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara

kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia berdasarkan data riil mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. Ketiga, besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat dan berbasis kemaslahatan ummat untuk masyarakat fakir dan miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Indikator, Standar Penetapan Keluarga, BPS

PENDAHULUAN

Pada Akhir 2009 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perkembangan kependudukan bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, sedangkan pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Penanggung jawab perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah pemerintah. Pemerintah Pusat menetapkan antara lain kebijakan nasional, pedoman, standar, prosedur, dan kriteria perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pemerintah provinsi menetapkan kebijakan daerah dan memfasilitasi pelaksanaan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menetapkan pelaksanaan perkembangan dan pembangunan keluarga di wilayahnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam jangka panjang untuk dibuat kebijakan dalam jangka menengah, dan dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.

Secara hierarkis, penanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini adalah Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat menetapkan, antara lain, kebijakan nasional, pedoman, standar, prosedur, dan kriteria perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pemerintah provinsi menetapkan kebijakan daerah dan memfasilitasi terlaksananya pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menetapkan pelaksanaan perkembangan dan pembangunan keluarga di wilayahnya masing-masing. Dalam penetapan kebijakan nasional dan pembuatan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi sangat penting mengingat hal ini mencakup, antara lain: Pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, Penurunan angka kematian, Mobilitas penduduk, Pengembangan kualitas penduduk, Penduduk rentan, Perencanaan kependudukan, Serta data dan informasi kependudukan.

Akibat proses perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, terjadi perubahan struktur dan komposisi penduduk, dan hal ini berdampak pada penduduk yang rentan terhadap perubahan. Pemerintah harus memberikan kemudahan atau perlindungan kepada kelompok penduduk rentan ini, minimal yang berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Akan tetapi, siapa dan bagaimana kelompok penduduk rentan ini? Apakah mereka miskin, ataukah sangat miskin? Apa saja kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka? Walaupun pemerintah telah memiliki kriteria untuk menentukan

penduduk miskin, penentuan sasaran (targeting) program pemerintah dengan menggunakan kriteria tersebut selama ini tidak tepat (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Beberapa kriteria penduduk miskin untuk penargetan program yang pernah digunakan pemerintah, antara lain :

1. Kriteria dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE 05) dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS 2008) dari BPS.
2. Program-program bantuan untuk penduduk miskin, yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, yang menggunakan kriteria tersebut, antara lain, adalah Tabungan Keluarga Sejahtera/Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Takesra/Kukesra), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), Operasi Pasar Khusus beras (OPK), Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar.

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga.

Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas). Selain dengan pendekatan moneter, kemiskinan juga dapat diukur dengan aspek lain seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi publik, kepemilikan barang berharga, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Secara Umum istilahnya miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya. Lebih gampangya, miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi sebahagianatau lebih dari seluruh kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang jadi tanggungannya. Dari uraian diatas penulis merasa tertarik, menulis sebuah karya ilmiah, dengan Judul **“ANALISIS INDIKATOR DAN STANDAR PENETAPAN KELUARGA MISKIN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH TENGGARA”**.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Miskin

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat **multidimensional**, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Masalah kemiskinan pada rumah tangga miskin kronis bisa menyebabkan rumah tangga tersebut terjat **"Poverty Traps"**. Rumah tangga miskin akan semakin sulit keluar dari poverty traps jika terdapat masalah struktural pada rumah tangga tersebut. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut BPS (2020), berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (**basic needs approach**) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Garis kemiskinan merupakan besaran pengeluaran dalam pengukuran makanan dan non makanan. Nilai garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu pada kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum, penduduk dikatakan miskin jika berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Kuncoro (2004) kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan, kebutuhan pokok, dan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin.

Indikator-Indikator Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai 34 beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

Berdasarkan Dimensi Ekonomi Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu

1. Aspek pendapatan.

2. Aspek konsumsi atau pengeluaran.

Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sifat penelitian ini adalah penelitian penggabungan penelitian deskriptif Kualitatif, dimana penelitian diperoleh pada lokasi penelitian dan sumber data lain. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan tempat dan lokasi studi lapangan atau Obyek penelitian kali ini adalah Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu Sistematis dan merupakan sebuah Metode ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dalam usaha memecahkan suatu permasalahan dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah kebutuhan Rumah Tangga, yang termasuk indikator penetapan Masyarakat Miskin. Menurut Sugiyono (2013:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (***Representative***) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Jumlah Masyarakat Miskin berdasarkan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisa data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang ada, hubungan antar variable, pengaruh serta kondisi, yang sebenarnya. Berdasarkan tujuan penelitian, tehnik analisa data Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan terutama mengenai Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

1. Reduksi data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan

mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, sebagai sebuah paramida yang pada akhirnya dapat ditemukan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk table dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Babussalam

Kecamatan Babussalam merupakan Sampel dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengingat jumlah desa yang tersebar di kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 385 Desa yang terdiri dari 16 Kecamatan. Babussalam sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara, provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota Aceh Tenggara, yakni Kota Kutacane berada di kecamatan ini. Pada Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk Babussalam sebanyak 29.676 jiwa, dengan kepadatan 3.130 jiwa/km². Sementara pada tahun 2021 jumlah penduduk Babussalam berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 29.026 jiwa.

Kecamatan Babussalam terdiri dari 27 gampong atau desa, yakni:

Tabel 1. Jumlah Desa Pada Kecamatan Babussalam Tahun 2024

No	Nama Desa
1	Alas Merancar
2	Batu Mbulan I
3	Batu Mbulan II
4	Batu Mbulan Asli
5	Batu Mbulan Baru
6	Batu Mbulan Sepakat
7	Gumpang Jaya
8	Kampung Melayu Gabungan
9	Kampung Raja
10	<u>Kota Kutacane</u>
11	Kutacane Lama
12	Kute Rih
13	Melayu I
14	Mbarung
15	Mbarung Datuk Saudane
16	Mendabe
17	Muara Lawe Bulan

18	Perapat Hilir
19	Perapat Hulu
20	Pulo Latong
21	Pulo Peding
22	Pulo Sanggakh
23	Pulonas
24	Pekhapat Sepakat
25	Pekhapat Titi Panjang
26	Terutung Pedi
27	Ujung Barat

Sumber : BPS Aceh Tenggara 2024

Pendapatan Perkapita Penduduk

Penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 67,25%. Adapun jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki piramida penduduk ekspansif yang berarti sebagian besar penduduknya adalah usia muda. Karenanya, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah angkatan kerja yang ada

Secara umum di Provinsi Aceh, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Namun hal ini berbeda dengan Kabupaten Aceh Tenggara dimana pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri mengalami kenaikan yaitu dari 63,99 % (2020) menjadi 69,61% (2021). Adapun permasalahan yang sering terjadi di daerah perkotaan adalah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, terutama kepemilikan rumah. Hal ini disebabkan antara lain karena terbatasnya lahan perumahan dan tingginya harga rumah di daerah perkotaan. Selain itu, memang alami di daerah perkotaan yang biasanya lebih banyak warga pendatang dibanding di daerah pedesaan menyebabkan kepemilikan rumah milik sendiri lebih kecil di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan.

Tabel 2. Proyeksi Penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun	202	202	202	203	203	204
Jlh. Penduduk (Jiwa)	220.86	224.11	245.93	273.39	303.93	345.10

Sumber: Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka, 2022 (diolah)

Indikator Dan Standar Penetapan Keluarga Miskin

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menghapus kemiskinan.

Tersedianya angka kemiskinan yang akurat di setiap wilayah dan dapat diperbandingkan di tingkat nasional merupakan syarat mutlak dalam penyusunan

kebijakan penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan memiliki fungsi dalam pembangunan nasional. Yaitu :

1. Fungsi yang pertama yaitu sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, termasuk kebijakan dan rencana peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sektoral.
2. Fungsi kedua, digunakan dalam penetapan sasaran (targeting) berbasis lokasi geografis maupun individu dan rumah tangga yang menjadi sasaran program-program pembangunan.
3. Ketiga, penentuan alokasi program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Keempat, berfungsi sebagai indikator pengawasan dan evaluasi program pembangunan termasuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang Nasional (RPJMN/RPJPN) maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Terakhir, menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah.

Ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik yang dipergunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga yang dapat dikategorikan miskin, berikut penjelasannya:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Berikut ini penulis menyampaikan Berikut beberapa contoh kemiskinan menurut jenis-jenisnya antara lain :

1. Kemiskinan Subjektif : Terjadi karena pemikiran sendiri dengan anggapan bahwa kebutuhan individu tersebut tidak dapat dipenuhi dengan cukup. Walaupun sebenarnya individu tersebut sebenarnya tidak miskin. Contoh : pengemis musiman.
2. Kemiskinan Absolut : Terjadi pada keluarga atau individu yang tidak memiliki penghasilan. Contoh : keluarga kurang mampu.

3. Kemiskinan Relatif : Terjadi karena pengaruh pembangunan yang tidak merata di masyarakat. Contoh : masyarakat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
4. Kemiskinan Alamiah : Terjadi karena langkanya sumber daya alam. Contoh: penduduk yang berada di wilayah benua Afrika.
5. Kemiskinan Kultural : Terjadi karena individu tersebut tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya. Contoh : masyarakat di pedalaman yang masih memegang teguh adat istiadat dan tidak membuka peluang pada modernitas, seperti masyarakat suku Baduy.
6. Kemiskinan Struktural : Terjadi karena struktur sosial. Contoh : Masyarakat Papua yang kurang mendapatkan manfaat dari Freeport

Evaluasi dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Penelitian yang telah dilakukan penulis pada kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, terhadap Indikator dan Standar Penetapan Keluarga Miskin pada badan pusat statistik kabupaten Aceh Tenggara. Dari 16 Kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara, Penulis Mengambil Babussalam sebagai sampel penelitian, hal ini mengingat banyaknya desa pada kabupaten Aceh Tenggara.

Dari indicator Penetapan Masyarakat Miskin yang ditebitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, dengan melihat Tabel 4-1, Tabel 4-2, serta Proyeksi Jumlah penduduk Pada Tabel 4-3, maka secara umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara memberikan Informasi Umum, bahwa masih terdapat masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tenggara, tanpa kecuali dengan kecamatan Babussalam.

Dari table 4-1 Jumlah Desa yang ada di kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dapat diperoleh informasi bahwa. Provinsi aceh memiliki penduduk miskin berdasarkan konsep antara lain :

1. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi **kebutuhan dasar (basic needs approach)**. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
2. **Garis Kemiskinan (GK).** **Garis Kemiskinan (GK)** merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
3. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
4. **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)** adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dari konsep pengukuran garis kemiskinan yang telah dilakukan uji materi oleh Badan Pusat Statistik, maka hasil penelitian meneunjukkan bahwa, Rata-rata penduduk Dikecamatan Babussalan, termasuk dalam golongan miskin, hal ini dapat dilihat dari :

1. Kemiskinan Absolut : Terjadi pada keluarga atau individu yang tidak memiliki penghasilan Tetap .
2. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
3. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
4. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
5. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
6. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
8. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis melakukan pembatasan dalam melaksanakan penelitian ini, yang bertujuan agar fokus kepada indentifikasi masalah dan Rumusan masalah Sehingga fokus penelitian ini pada Indikator dan standar yang dipergunakan dalam menetapkan Masyarakat Miskin dikabupaten aceh Tenggara. Isu kemiskinan menjadi penting bukan hanya karena alasan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas rumah tangga agar berkemampuan akses kepada dimensi-dimensi strategis guna menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan.

Dengan menggunakan pengukuran multidimensi, tingkat kemiskinan rumah tangga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran moneter berdasarkan pengeluaran atau konsumsi. Hal ini menunjukkan pengukuran kemiskinan secara multidimensi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai deprivasi atau kekurangan yang dapat dialami rumah tangga secara bersamaan dalam satu waktu. Hasil hasil penelitian diperoleh data bahwa Masyarakat dikecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikelompokkan dalam Kategori Miskin dari idikasi sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut : Terjadi pada keluarga atau individu yang tidak memiliki penghasilan Tetap .
2. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
3. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
4. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
5. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
6. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
8. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- 9.

Saran-saran

Saran Mengacu pada penelitian yang sudah dilaksanakan, adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin bagi masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan seperti meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Bagi Masyarakat Sebagai masyarakat, semestinya memberikan dukungan terhadap program pemerintah dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan sendiri dan tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menciptakan peluang kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik penelitian mengenai tingkat kemiskinan untuk menggunakan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meningkatkan akurasi penelitian dengan menambah jumlah atau subyek yang diteliti dan mencoba menggunakan metode lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang masalah kemiskinan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2005). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Januari 2005.
- Boediono. (2001) . Ekonomi Makro Edisi 4. Penerbit Yokyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik.(2016). Jumlah Penduduk miskin Indonesia.
- Moleong, Lexi J, Dr.M.A. (2006) . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit ; Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua belas, Penerbit : Alfabeta Bandung.
- Arikunto, (2002). *Prosedur Penelitian* .PT.Rineka Cipta Penerbit Bandung
- Nugroho, Heru. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media.
- Owin. (2004) . Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Blantika.
- Suryawati. (2004). Teori Ekonomi Mikro. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Nugroho, Heru. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media
- Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.

- Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN.
- Ali, Khosman,. (2015) Indikator Kemiskinan, Jakarta : Pustaka Obor Indonesi.
- Amirudin,Zainal Asikin. , (2003) Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. Retrieved from bps.go.id: (2023). Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. Retrieved from bps.go.id: (n.d.).
- Badan Pusat Statistik (2022) Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2020-2022. Retrieved from jabar.bps.go.id: (2023).
- Badan Pusat Statistik (2020) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2018-2020. Retrieved from jabar.bps.go.id.